

Evaluasi Kompetensi Siswa **2**

A. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!

1. Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 dalam urutan tertinggi perundang-undangan disebabkan oleh
 - a. ditetapkan oleh badan khusus yaitu PPKI
 - b. dibuat oleh para pendiri bangsa
 - c. di dalamnya ada dasar negara Pancasila
 - d. tidak boleh diamendemen
2. Konstitusi mengatur hubungan antarlembaga negara dan warga negaranya agar tetap mendapatkan perlindungan HAM. Jika demikian konstitusi berfungsi
 - a. sebagai hukum dasar yang tertinggi
 - b. mengatur hubungan antarlembaga negara agar tidak saling tumpang tindih
 - c. sebagai pengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
 - d. membatasi dan mengontrol tindakan pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang
3. Saat ini, banyak sekali terjadi ketidakbebasan dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Kadang ketidakbebasan itu terjadi karena adanya peraturan daerah yang ingin melindungi pemeluk agama tertentu. Hal ini berarti peraturan daerah tersebut harus
 - a. direvisi
 - b. dibatalkan
 - c. ditinjau ulang
 - d. dijalankan karena perda merupakan kebutuhan daerah
4. Peraturan perundang-undangan ini juga menjadi rujukan dalam pembentukan undang-undang. Peraturan ini ada yang bersifat konkret dan khusus, seperti pengangkatan dan pemberhentian presiden. Peraturan yang dimaksud adalah

- a. UUD NRI Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Keputusan MPR
 - d. peraturan pemerintah pengganti undang-undang
5. Peraturan berikut yang sifatnya menjalankan undang-undang adalah
 - a. Undang-Undang tentang Lalu Lintas
 - b. Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Komisaris dan Direktur BUMN
 - c. Peraturan Daerah tentang Hak dan Kewajiban Kepala Daerah
 - d. Peraturan Menteri tentang Evaluasi APBD
 6. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dalam proses pembuatannya juga mengacu pada UUD NRI Tahun 1945, terutama Pasal
 - a. 31
 - b. 32
 - c. 33
 - d. 34
 7. UUD NRI Tahun 1945 juga berfungsi sebagai alat uji apakah peraturan di bawahnya sesuai apa tidak. Hal ini menegaskan bahwa UUD NRI Tahun 1945 sebagai
 - a. alat pengikat
 - b. pedoman penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara
 - c. pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
 - d. alat kontrol
 8. Peraturan ini dibentuk untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan ini dibentuk oleh DPRD. Peraturan yang dimaksud adalah
 - a. peraturan kepala daerah
 - b. peraturan walikota
 - c. peraturan gubernur
 - d. peraturan daerah
 9. Sesuai fungsinya, setiap peraturan perundang-undangan dibentuk untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jika peraturan perundang-undangan yang dibentuk adalah peraturan pemerintah, peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukannya adalah
 - a. UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Presiden
 - b. Undang-undang dan Peraturan Menteri
 - c. Undang-undang dan Peraturan Presiden
 - d. Undang-undang dan Ketetapan MPR
 10. Peraturan perundang-undangan harus selalu ditaati oleh warga negara Indonesia. Berikut peraturan warga negara yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia adalah
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten T Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelarangan Peredaran Alkohol
 - b. Peraturan Menteri T Nomor 1 Tahun 2020 tentang Disiplin Pegawai Kementerian T
 - c. Peraturan pemerintah yang berkait dengan larangan bagi warga negara asing untuk memiliki tanah
 - d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 11. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk setidaknya harus memiliki tiga landasan berikut yaitu
 - a. - filosofis
- sosiologis
- ekonomis
 - b. - Pancasila
- UUD NRI Tahun 1945
- yuridis
 - c. - filosofis
- Pancasila
- UUD NRI Tahun 1945
 - d. - filosofis
- sosiologis
- yuridis
 12. UUD NRI Tahun 1945 hanya berisikan sendi-sendi hukum dasar negara Indonesia. Contoh: asas ekonomi Indonesia adalah kekeluargaan. Hal ini berarti UUD NRI Tahun 1945 bersifat
 - a. fleksibel
 - b. supel
 - c. singkat
 - d. membutuhkan peraturan pelaksana
 13. Peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah lembaga
 - a. eksekutif dan yudikatif
 - b. yudikatif dan legislatif
 - c. eksekutif dan legislatif
 - d. eksekutif atau legislatif

14. Setelah Indonesia merdeka, PPKI bekerja dengan cepat untuk membentuk UUD. Hal ini karena UUD merupakan syarat ... berdirinya negara.
 - a. konstitutif
 - b. deklaratif
 - c. formalitas
 - d. material
15. Adanya konstitusi merupakan alat untuk mengontrol kewenangan lembaga negara agar tidak berbuat sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan paham
 - a. demokrasi
 - b. republikanisme
 - c. liberalisme
 - d. konstitusionalisme
16. UUD NRI Tahun 1945 yang dikenal sebagai pokok kaidah negara fundamental menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Baik UUD NRI Tahun 1945 maupun peraturan perundang-undangan tersebut termasuk hukum dasar yang
 - a. mengikat seluruh masyarakat Indonesia
 - b. berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia
 - c. tidak tertulis
 - d. tertulis
17. Jika kamu membuka naskah lengkap UUD NRI Tahun 1945 hasil amendemen. Bagian yang tidak ditemukan jika dibandingkan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebelum amendemen adalah
 - a. pembukaan
 - b. batang tubuh
 - c. pasal-pasal
 - d. penjelasan
18. Proklamasi Kemerdekaan yang dibaca oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat dipahami secara lebih rinci pada
 - a. alinea ke - 1 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - b. alinea ke - 2 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - c. alinea ke - 3 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - d. alinea ke - 1 sampai alinea ke - 3 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
19. Lembaga yang membentuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah
 - a. BPUPKI
 - b. PPKI
 - c. KNPI
 - d. para pendiri bangsa Indonesia
20. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 jika diubah berarti pembubaran negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat
 - a. tidak boleh diubah-ubah
 - b. luhur
 - c. universal
 - d. lestari
21. Prinsip negara Indonesia yang tidak termuat dalam alinea ke - 4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah
 - a. dasar negara, yaitu Pancasila
 - b. ketentuan diadakannya UUD
 - c. bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat
 - d. negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum
22. Berikut merupakan hubungan antara Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah
 - a. memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada 17 Agustus 1945
 - b. memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945
 - c. memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945
 - d. semua jawaban benar
23. Pernyataan berikut yang merupakan bukti Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 termasuk *staatsfundamentalnorms* ditinjau dari terjadinya adalah
 - a. adanya asas politik negara di alinea kedua dan keempat
 - b. ada tujuan negara di alinea keempat
 - c. adanya ketentuan untuk mengadakan UUD sebagaimana terdapat dalam alinea keempat
 - d. ada pernyataan " ... maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."
24. DPR membentuk peraturan perundang-undangan. Ternyata undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Para penggugat undang-undang tersebut harus beracara di
 - a. Pengadilan Negeri
 - b. Pengadilan Tinggi
 - c. Mahkamah Agung
 - d. Mahkamah Konstitusi

25. Salah satu fungsi UUD NRI Tahun 1945 adalah pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini terdapat dalam
- Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945
 - Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945
 - Pasal 18A UUD NRI Tahun 1945
 - Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945
26. UUD NRI Tahun 1945 sudah 4 kali diamendemen. Hal tersebut bertujuan memasukkan aturan-aturan ketatanegaraan yang terus-menerus berkembang. Sifat UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud adalah
- tertulis
 - singkat dan supel
 - fleksibel
 - hukum positif tertinggi
27. UUD NRI Tahun 1945 memiliki sifat pengatur. Sifat demikian terdapat dalam
- Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik
 - Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
 - Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
 - Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang
28. Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mensyaratkan bahwa untuk mengubah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Jika dilihat dari proses mengubah UUD NRI Tahun 1945, konstitusi Indonesia dapat dinyatakan
- rigid
 - fleksibel
 - tertulis
 - singkat dan supel
29. Berikut ini merupakan kewenangan MPR dalam amendemen UUD NRI Tahun 1945 adalah
- mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
 - membatalkan hasil amendemen UUD NRI Tahun 1945
 - mengubah bentuk sistem pemerintahan menjadi berkedaulatan hukum
 - mengubah batang tubuh atau pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 secara adendum
30. Substansi berikut yang tidak mungkin ada dalam undang-undang dasar sebuah negara adalah
- hak asasi manusia
 - hak dan kewajiban warga negara
 - wilayah negara dan pembagian daerah
 - lingkungan hidup